

# BUKAN INGIN

NGERECOKI KINERJA PEMERINTAH



Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi DKI Jakarta, Ny.Hj. Wien Ritola SH mengemukakan, Tim Penggerak PKK bukan bermaksud untuk 'ngrecoki' kinerja Pemerintah, melainkan untuk menjalin kerjasama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Seribu itu, Ny. Hj. Wien Ritola mengemukakan adalah untuk menyusun konsep rakoornis bagaimana mengoptimalkan

**P**KK dengan Kepmendagri 53 Tahun 2001 kedudukannya merupakan mitra kerja dari Pemerintah Daerah/ Kabupaten di semua wilayah di Indonesia. PKK DKI Jakarta beserta segenap jajarannya, sampai di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program kerja pemerintah.

"Selama ini, kalau TP PKK Propinsi DKI Jakarta mengundang para pejabat dari berbagai instansi di lingkungan Pemprop DKI Jakarta, yang datang bukan pejabatnya, melainkan isteri para pejabat. Padahal undangan

tersebut untuk mengikuti rapat koordinasi penyusunan program kerja dalam pembangun sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga," tutur Ny.Hj. Wien Ritola SH di depan para peserta rapat koordinasi teknis (Rakornis) pemberdayaan perempuan dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu tahun 2003 di Aula kantor kabupaten tersebut akhir Juli lalu.

Rakoornis yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu itu disamping dihadiri para pengurus Tim Penggerak PKK dari kelurahan, kecamatan dan Kabupaten Kepulauan

program-program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Sayangnya, para pejabat di lingkungan kabupaten tersebut banyak yang mengirimkan wakilnya, terutama para isteri pejabat bersangkutan. Ini karena adanya salah persepsi, dikira yang mengundang adalah Tim Penggerak PKK Propinsi DKI Jakarta. Namun demikian, sebagian besar isteri pejabat itu memang pengurus PKK, sehingga dari mereka dapat diperoleh berbagai masukan tentang apa, bagaimana dan harapan kaum perempuan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Ini terjadi, kata Ny Wien Ritola, karena mungkin ketidaktahuan para

pejabat bersangkutan kedudukan PKK saat ini. Secara legitimate posisi PKK sekarang itu di mana

"Karenanya, dalam kesempatan ini kami mengharapkan agar bapak-bapak bisa menyampaikan tentang kedudukan PKK ini kepada masyarakat bahwa PKK bukan bermaksud untuk meminta atau membujuk kepada dinas atau instansi tentang program yang akan dikerjakannya. Tetapi menawarkan diri sebagai mitra untuk melaksanakan program dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai mitra kerja pemerintah untuk memanfaatkan organisasi yang bernama PKK itu dalam pembangunan masyarakat seutuhnya. Yang jelas, beberapa pelaksana program yang memerlukan PKK itu sangat banyak," tutur Ny Wien Ritola.

Sebagai contoh, Dinas Kesehatan, bagaimana mereka berhasil melaksanakan program pekan imunisasi nasional (PIN), juga berkat kerjasama dengan Tim Penggerak PKK. Demikian pula dalam pemasyarakatan program keluarga berencana (KB), demikian pula pelaksanaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) secara optimal, juga berkat kerjasama dengan Tim Penggerak PKK. Banyak program yang berhasil

dilaksanakan dengan menggandeng PKK sebagai ujung tombak kegiatannya

"Demikian pula bagaimana Dinas Perumahan DKI Jakarta mensosialisasikan cara hidup di rumah susun, juga berkat jalinan kerjasama dengan Tim Penggerak PKK. Keberhasilan itu kemungkinan besar dalam menyampaikan program

tersebut PKK dinilai lebih manusiawi, sehingga bisa menerimanya. Demikian pula dalam memanfaatkan pekerjaan, memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah yang bisa disosialisasikan lewat PKK. PKK bukan minta uang dari mitra kerja, ada kalanya mitra kerja ini

menyusun program kerja dan pelaksanaannya dipercayakan kepada PKK. Yang punya program tetap instansi atau dinas-dinas, SPJ-nya juga dinas-dinas, tetapi PKK diajak dalam perencanaan, pelaksanaan dan mencari sasaran," ujarnya.

#### **Pekerja sosial**

Dijelaskan pula PKK merupakan organisasi yang sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan sebagai pekerja sosial. Agar PKK lebih dikenal, tak bosan-bosannya memberikan informasi kepada para birokrat tentang bagaimana kedudukan PKK. Mungkin, zaman dulu PKK dianggap

sebagai tunggangan partai politik, tetapi di era reformasi ini, PKK dengan paradigma barunya keadaannya sudah berubah sejak musyawarah nasional (Munas) PKK di Hotel Hegar Manah, Bandung tahun 2002 lalu

"Sejak saat itu PKK mengubah fungsinya dari Peningkatan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. PKK telah melakukan reposisi organisasi dan melakukan beberapa perubahan tentang konsep dan mekanisme kerja. Salah satu yang menonjol, adalah soal pemilihan pengurus, bukan lagi secara fungsional seperti dulu, melainkan mencari orang-orang yang berkualitas tinggi dari tingkat kelurahan," ujarnya.

Ny Wien Ritola juga menegaskan, jika dalam organisasi ini masih ada isteri para pejabat yang menjadi pengurus PKK, jangan diambil dari segi negatifnya, tetapi juga dari segi positifnya. Para isteri lurah dan aparat kelurahan itu diupayakan belajar untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga pada pemilihan itu tidak dipermalukan manakala tidak terpilih sebagai pengurus. Karena PKK sekarang lebih berorientasi menggalang kader yang berkualitas dan berwawasan agar mampu menjalankan organisasi ini.

Isteri lurah dan aparat lainnya harus diajari dan didekatkan dengan masyarakat sehingga, karena ia mampu bermasyarakat,



masyarakat pun akan memilihnya sebagai pengurus PKK tingkat kelurahan dan selanjutnya. Program dengan para kader. Ini memerlukan pembiasaan yang lama. Dengan adanya peraturan tersebut, sehingga ada persaingan antara mereka untuk menduduki jabatan sebagai pengurus PKK. Karena pemilihan kualitas SDM-nya juga cukup ketat maka organisasi PKK itu juga akan mampu memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dengan demikian, mereka akan bisa mewakili dalam musyawarah PKK tingkat kelurahan," ujarnya.

Tak bisa dipungkiri bahwa untuk tingkat-tingkat tinggi, masih perlu penunjan karena PKK masih perlu fasilitas. Sebab, hingga sekarang PKK belum mandiri betul. Terutama fasilitas dari Pemda untuk memperlancar program kerja PKK ke tengah-tengah masyarakat.

**Wajib punya rakor**

Ketika setiap PKK harus mengemukakan pendapatnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.108 setiap daerah wajib menetapkan renstra dalam jangka waktu 1 bulan setelah pelantikan Kepala Daerah. Demikian pula Pemprop DKI Jakarta yang bulan Oktober 2002 menetapkan H Sutiyoso dan H Fauzi Bowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DKI

Jakarta, satu bulan berikutnya harus keluar renstra lima tahun dari Pemprop DKI Jakarta.

Renstra Pemprop DKI Jakarta tahun 2002-2007 itu akan bisa optimal dilaksanakan dan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila didukung berbagai pihak yang memiliki komitmen dalam membangun kota Jakarta. Di sini bisa dilihat di mana kedudukan PKK. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 53 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 6 disebutkan, Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah. Karenanya, PKK punya hak untuk memberikan informasi kepada para pejabat di Kepulauan Seribu bahwa PKK mempunyai dasar hukum yang legitimate untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi di lingkungan Kabupaten maupun Propinsi.

"PKK sebagai mediator yang berada di tengah-tengah dinas dan instansi. Kepentingan masyarakat bisa disampaikan kepada Pemda melalui PKK. Kenapa PKK harus punya renstra, berdasarkan usulan-usulan program PKK selama ini, ternyata belum sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat di bawah. Karena pola yang diterapkan selama ini menganut system 'top down' dan di era reformasi ini diubah menjadi 'bottom up'. Pelaksanaan program yang lama dengan main paksa, sesuai program dari Pusat, tetapi sebaliknya kini mengacu kepada keinginan masyarakat" tegasnya.

PKK sebagai mitra kerja harus

seiring dengan rencana-rencana daripada mitra kerjanya, dalam hal ini jajaran dari Pemprop DKI Jakarta. Karena renstra PKK ini acuannya diambil dari renstra Pemprop DKI Jakarta. Jika Dinas-dinas atau instansi-instansi mengacu para renstra Pemprop DKI Jakarta, PKK pun melaksanakan program kerjanya berdasarkan renstra yang mengacu pada renstra Pemprop DKI Jakarta. Jadi, dalam pertemuan rakoromis semacam itu, akan bisa ada persesuaian programnya, karena tidak akan keluar dari renstra Pemprop DKI Jakarta.

"Melalui rakoromis semacam inilah kesempatan terbaik untuk mensinkronkan usulan PKK dengan mitra kerjanya. Ini sebagai tindak lanjut dari hasil rakoroda PKK dengan seluruh instansi dan dinas-dinas di lingkungan Pemprop DKI Jakarta di gedung PKK Melati Jaya yang lalu," tambah Ny Wien Ritola.(st) [ ]

**Keterangan Gambar:**

1. Para peserta Rakoroda PKK DKI
2. Ny. Hj. Wien Ritola SH, sebagai pembicara dalam Rakoromis Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kepulauan Seribu.
3. Ny. Hj. ritola SH, ketika mendampingi Ny. Rini Sutiyoso
4. Hasil kreasi anggota TP PKK RW 03 PIK Pulo Gadung

